

# DAMPAK KONFLIK SOSIAL ANTAR ETNIS TAHUN 2001 TERHADAP POLA INTERAKSI SOSIAL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR KALIMANTAN TENGAH

Oleh:

**Kumpiady Widen<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Palangka Raya

Email :

## ABSTRAK:

Dilaksanakannya penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa dengan terjadinya konflik sosial antar etnis di Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2001 banyak menimbulkan berbagai dampak sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi masyarakat. Diantaranya adalah semakin menguatnya solidaritas etnis (identitas etnis) yang justru bisa pendorong semakin rapuhnya hubungan interaksi sosial antar etnis. Keadaan demikian, apabila tidak dikelola dengan baik, pada akhirnya bisa menyulut suatu konflik sosial yang tidak kita kehendaki di masa yang akan datang. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data primer menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Di samping itu tim peneliti juga menelaah beberapa dokumen tertulis yang berkaitan dengan substansi penelitian. Tujuan penelitian adalah (1) untuk menemukan berbagai faktor penyebab terjadinya konflik sosial antar etnis di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2001, (2) Menemukan berbagai dampak dari konflik sosial antar etnis tersebut terhadap pola interaksi sosial di Kota Sampit, (3) Merumuskan model pembinaan dan pengembangan masyarakat multikultur yang menghargai kebhinnekaan dan cinta damai. Sedangkan manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi pemerintah di Kabupaten Kotawaringin Timur untuk (1) menyusun rencana strategis pembangunan, khususnya yang berhubungan dengan pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dan (2) menyusun suatu sistem pembinaan dan pengembangan masyarakat yang multikultur agar masyarakat bisa memahami, menerima, menghormati, dan menghargai keanekaragaman/kebhinnekaan dalam masyarakat. Pembinaan dan pengembangan seperti inilah yang diharapkan dapat menjamin tatanan kehidupan masyarakat yang cinta damai, bertoleransi, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kesatuan dan persatuan negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci :** *Konflik Sosial, Interaksi Sosial, Toleransi, Etnis dan Multikultur*

## ABSTRACT:

This study is undertaken based on the assumption that the occurrence of inter-ethnic social conflict in East Kotawaringin, Central Kalimantan in 2001 caused a number of social, cultural, economic and political impacts to local community. One of the most important impacts is the rise of Ethnic Identity among the Dayak. If this issue is not managed and built properly, it will

trigger new social conflict in the near future. The study used Qualitative Approach in our effort to understand very well the phenomena of social conflict. Participant Observation and in-depth interview have been used for collecting the primary data in the field, meanwhile the relevant written sources (secondary data) has also been considered. The objective of this study is to: (1) find out some factors caused inter-ethnic social conflict in East Kotawaringin in 2001, (2) find out some impacts of the social conflict on social interaction in the community, (3) design a proper model for building and developing multicultural community in Sampit. The advantages of the research will be used by the Regency Government of East Kotawaringin in (1) planning the strategic development Program related to social, culture, economic and political development, and (2) designing a proper system for building and developing multicultural community in Sampit who will understand, appreciate, and respect diversity among the community. This type of building and development will guarantee the community live in peace, tolerance, and in unity.

**Key Words:** *Social Conflict, Social Interaction, Tolerance, Ethnicity, and Multiculture*

## PENDAHULUAN

Pada era rezim Orde Baru kehidupan hampir seluruh masyarakat tradisional/lokal ibarat hidup dalam “penjara.” Kebebasan dalam segala hal seolah dipasung oleh kebijakan politik pemerintah pada saat itu. Dengan jatuhnya pemerintah rezim Orde Baru yang otoriter dan diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, masyarakat tradisional/lokal merasa seolah-olah bebas dari “penjara.” Kebebasan inipun seolah kebablasan karena pemahaman tentang kebebasan tersebut menurut masyarakat sangat berbeda dari konsep yang dituangkan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Akibatnya kebebasan tersebut digunakan sebagai senjata oleh masyarakat lokal untuk menuntut hak-hak mereka dalam segala bidang. Tuntutan mereka pun sering terlalu berlebihan sehingga tidak jarang menimbulkan konflik sosial baik yang bersifat horizontal maupun bersifat vertikal. Kondisi inilah yang ikut mendorong suatu proses perubahan sosial dalam masyarakat, seperti semakin renggangnya kohesi sosial dan hubungan antar etnis. Pecahnya konflik sosial antar etnis di Sampit tahun 2001, misalnya, merupakan salah satu bentuk rapuhnya hubungan interaksi sosial

antara orang Dayak dan orang Madura.

Undang-Undang Otonomi Daerah No. 32 Tahun 2004 sesungguhnya merupakan perubahan paradigma kebijakan pembangunan di Indonesia dari *TopDown Policy* menjadi *Bottom Up Policy*. Di samping memberikan sebagian wewenang kebijakan pembangunan kepada pemerintah daerah dan masyarakat, Undang-Undang Otonomi Daerah ini juga ikut memperparah pola hubungan interaksi sosial dalam masyarakat menjadi semakin kompleks. Kompleksitas proses interaksi sosial tersebut apabila tidak dikelola sedini mungkin akan menjadi bom waktu yang siap meledak setiap saat.

Dengan bergulirnya budaya demokrasi dan diperkaya lagi oleh dampak arus globalisasi, maka pelaksanaan Otonomi Daerah pun terasa semakin rumit. Identitas etnis semakin menguat dan tak terkendalikan lagi. Mulai dari tuntutan pemekaran wilayah (provinsi, kabupaten, dan kecamatan), rumitnya proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) dengan ditebarkannya isu putra daerah, upaya pemaksaan unsur adat-istiadat tertentu seperti Sumpah Adat, klaim atas batas-batas wilayah desa, kecamatan, kabupaten dan

bahkan provinsi, wacana pemekaran provinsi baru di Kalimantan Tengah, dan masalah identitas agama merupakan indikator-indikator penting yang bisa merubah pola hubungan interaksi sosial antar etnis. Indikator-indikator ini patut diperhitungkan agar segera dikelola sehingga tidak sempat memicu suatu konflik sosial yang justru akan merugikan masyarakat dan pemerintah dima sayang akan datang.

Sehubungan dengan fenomena tersebut, maka ada tiga masalah besar yang saling berkaitan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu (a) Faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya konflik sosial antar etnis di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2001? (b) Bagaimanakah dampak konflik sosial antar etnis tersebut terhadap pola interaksi sosial antar etnis di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur? Dan (3) Bagaimanakah model pembinaan dan pengembangan masyarakat multikultural di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur? Sedangkan tujuan dari Penelitian adalah untuk (a) menemukan berbagai faktor pendorong terjadinya konflik antar etnis di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2001, (b) menemukan dampak konflik antar etnis tersebut terhadap pola interaksi sosial di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur, dan (c) merumuskan model pembinaan dan pengembangan masyarakat multikultural agar bisa memahami dan menerima keanekaragaman/kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat di kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan terlaksananya ini sudah tentu akan memberikan manfaat yang besar baik bagi tim peneliti, pengembangan ilmu, maupun untuk kepentingan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan bahkan Provinsi Kalimantan Tengah dalam merencanakan dan merangsang program pembangunan yang tidak mengabaikan program pembinaan dan pengembangan Sumber Daya manusia untuk menjamin kehidupan yang damai, penuh

persaudaraan, menjunjung toleransi dan kesatuan dan persatuan.

Bagi tim peneliti, penelitian tentang konflik sosial ini yang pernah terjadi di kota Sampit dan Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada tahun 2001 merupakan penelitian yang penting dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal seperti pembinaan integrasi sosial dan integrasi nasional, pencegahan kemungkinan terjadinya konflik sosial dalam waktu dekat, dan upaya kita untuk membangun masyarakat damai dan multikultural. Diharapkan pula, dari hasil penelitian ini akan diperkenalkan sebuah model pembinaan dan pengembangan masyarakat multikultur di Kabupaten Kotawaringin Timur.

## KERANGKA TEORI

### Interaksi Sosial

Dewasa ini para ahli sosiologi dan antropologi memperhatikan dua segi dari masyarakat, yaitu segi statisnya atau struktur masyarakat serta dari segi dinamisnya atau fungsi dari masyarakat itu sendiri. Memang tidak dapat disangkal bahwa masyarakat memiliki bentuk-bentuk strukturalnya seperti misalnya kelompok-kelompok sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, akan tetapi kesemua itu mempunyai suatu derajat dinamikanya yang khas yang menyebabkan pola-pola **prielakuan** yang berbeda, tergantung dari masing-masing situasi yang dihadapinya. Perubahan dan perkembangan masyarakat yang mewujudkan segi dinamikanya, disebabkan oleh karena para warganya mengadakan hubungan satu dengan lainnya, baik dalam bentuk orang perorang maupun antar kelompok manusia.

Sebelum hubungan-hubungan tersebut mempunyai bentuk yang konkrit, maka terlebih dahulu dialami suatu proses ke arah bentuk konkrit yang sesuai dengan nilai-nilai sosial di dalam masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa proses-

proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorang dan kelompok-kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Atau dengan perkataan lain, proses-proses sosial diartikan sebagai pengaruh timbal balik antar berbagai segi kehidupan manusia.

Menurut Soekanto (1986) bahwa bentuk umum dari proses-proses sosial adalah interaksi sosial (proses sosial), oleh karena interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya berbagai aktivitas sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok manusia, maupun antar individu dengan kelompok manusia. Apabila dua orang bertemu, interaksi sosial dimulai; pada saat itu mereka saling menegur, berjabat tangan, saling berbicara atau bahkan mungkin berkelahi.

### Syarat Terjadinya Interaksi Sosial.

Masih menurut Soekanto (1986) ada dua syarat yang membuka akses terjadinya interaksi sosial, yaitu:

Adanya Kontak Sosial (*Social Contact*). Kontak sosial dapat berlangsung dalam tiga bentuk, yaitu antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya.

Adanya komunikasi (*Communication*). Dalam komunikasi bisa langsung dan bisa juga secara tidak langsung. Langsung artinya langsung bertatap muka, sedangkan tidak langsung bisa menggunakan media seperti telepon, surat, internet, dan lain-lain. Artinya yang terpenting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perikelakuan orang lain, dan perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Kelemahan dari komunikasi ini adalah

sering sekali proses tafsiran terhadap orang lain (budayanya) bisa salah kaprah sehingga sering berujung pada pertentangan atau konflik antar individu; individu dengan kelompok; dan kelompok dengan kelompok (Surata dan Andrianto, 2001; Castells, 1997; Isaacs, 1993).

### Bentuk-Bentuk Interaksi Sosial

Bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa (a) Kerjasama (*Cooperation*), (b) Persaingan (*Competition*), (c) pertentangan (*Conflict*). Hal ini diasumsikan oleh Soekanto (1986) bahwa pada umumnya setiap adanya pertemuan antar individu atau kelompok yang berbeda dan belum saling mengenal pasti melalui tiga proses ini, yaitu pertama-tama (a) Kerjasama, kemudian muncul (b) kompetisi, dan karena semakin tajamnya persaingan/kompetisi, maka akan menimbulkan (c) pertentangan (*conflict*). Ditambahkan, bahwa biasanya apabila suatu konflik bisa diredakan, kemudian akan munculah bentuk interaksi sosial yang keempat ialah (d) Akomodasi, yaitu suatu bentuk penyesuaian diri walaupun hanya sebentar karena kedua belah pihak kurang bisa menerima hasil keputusan untuk menghentikan konflik.

Lebih lanjut Gilin and Gilin (1954) menyatakan bahwa dalam proses interaksi sosial pasti akan terjadi dua macam pola interaksi sosial berikut:

- a. Proses Asosiatif, terdiri atas: Akomodasi (penyesuaian diri) dan Asimilasi dan Akulturasi
- b. Proses Disosiatif, terdiri atas: Persaingan dan Pertentangan/Konflik

Dalam penelitian ini konsep Gilin and Gilin tentang dua pola interaksi sosial tersebut akan dijadikan acuan untuk mengkaji dan menemukenali faktor penyebab konflik antar etnis di Kotawaingin Timur tahun 2001. Dalam penelitian ini akan dikaji pula tentang berbagai dampak dari konflik antar etnis

tersebut pola interaksi sosial, dan merumuskan model pembinaan dan pengembangan masyarakat multikultural. Pada akhirnya kehidupan bermasyarakat yang demokratis, dinamis, damai, dan saling menghargai dan saling memahami dan menerima perbedaan dapat diwujudkan sebagai modal dasar pembangunan.

### Perubahan Sosial

Setiap masyarakat dalam perjalanan hidupnya dan dimana saja ia berada, pasti akan mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan secara lambat maupun perubahan secara cepat (revolusi). Menurut Soekanto(1986) perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, susunan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, pola interaksi sosial dan lain-lain. Perubahan-perubahan sosial tersebut bisa dipengaruhi oleh faktor dari luar dan faktor dari dalam. Faktor dari dalam, yaitu: (a) penambahan dan pengurangan penduduk, (b) penemuan-penemuan / tata aturan baru, (c) pertentangan (konflik), dan (d) pemberontakan atau revolusi dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Sedangkan pengaruh dari luar yaitu (a) sebab-sebab yang berasal dari lingkungan fisik yang ada di sekitar masyarakat (banjir, tsunami, gunung meletus, gempa bumi dll). (b) peperangan dengan negara lain, (c) pengaruh kebudayaan masyarakat lain.

### Konflik Sosial

Konflik sosial dapat difahami melalui pendekatan Fungsionalisme Struktural dan Teori Konflik. Teori Fungsionalisme Struktural menilai bahwa fakta dan realitas sosial adalah fungsional, sementara Teori Konflik menyoroiti fakta sosial seperti wewenang dan posisi justeru merupakan sumber pertentangan (konflik). Ide pokok Teori Konflik dapat dibagi menjadi

tiga, yaitu (1) masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai dengan adanya pertentangan terus-menerus diantara unsur-unsurnya, (2) setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial, dan (3) keteraturan yang terdapat dalam masyarakat itu hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau pemaksaan kekuasaan dari atas oleh golongan yang berkuasa. Tokoh Teori Konflik ini adalah Dahrendorf, George Simmel, Karl Marx, Marx Weber dan Lewis A. Coser.

Sementara Teori Fungsionalisme Struktural membagi idenya menjadi tiga pula, yaitu: (1) masyarakat dalam kondisi statis atau bergerak dalam kondisi teratur dan keseimbangan, (2) setiap elemen atau institusi memberi dukungan terhadap stabilitas, (3) anggota masyarakat terikat secara informal pada norma-norma, nilai-nilai dan moralitas umum yang diakui dan berlaku dalam masyarakat. Terjadinya konflik dalam masyarakat, menurut Teori Fungsionalisme Struktural, karena tidak berfungsinya integrasi sosial dan *equilibrium*. Oleh karenanya harmoni dan integrasi sosial serta stabilitas dipandang fungsional yang paling bernilai tinggi, dan konflik harus dihindari. Tokoh teori ini adalah Robert Merton dan Talcott Parsons.

Sedangkan mengenai sumber potensi konflik, Koentjaraningrat (1976) mengatakan bahwa paling sedikit ada 5 (lima) macam sumber konflik dalam masyarakat majemuk, yaitu: (1) adanya persaingan antar kelompok etnis dalam memperoleh sumber kehidupan langka yang sama, (2) ada kelompok etnis yang memaksakan unsur-unsur kebudayaannya kepada kelompok yang lain, (3) ada golongan agama yang fanatik memaksakan ajarannya kepada golongan agama lainnya, (4) bila suatu suku bangsa berusaha mendominasi suku bangsa yang lain secara politis, dan (5) adanya potensi konflik yang sudah mengakar dalam masyarakat, (6) ketidakadilan terhadap masyarakat lokal baik oleh pemerintah maupun

oleh perusahaan, (7) rusaknya dan semakin terbatasnya lingkungan masyarakat lokal yang berhubungan dengan kepemilikan secara adat, (8) distribusi kekuasaan yang tidak merata, (9) akibat tidak taatnya individu sebagai pihak yang dikuasai terhadap sanksi yang diberikan oleh pihak yang sedang berada pada posisi menguasai (No. 6,7,8, dan 9 tambahan dari penulis). Selain kesembilan sumber potensi konflik tersebut tentu masih banyak sumber potensi konflik lainnya, termasuk sistem perekonomian, hukum, dan politik yang tidak sama. Bila dilihat dari bentuknya, konflik dapat dibagi menjadi dua yaitu (a) konflik vertikal, dan (b) konflik horizontal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah atau dengan perusahaan. Atau konflik yang terjadi antara *the powerless* dan *the powerful*. Berbagai kasus konflik vertikal yang terjadi di Indonesia adalah Aceh, Papua, dan Riau, Kasus Pilkada Kabupaten Tuban (29/4/2006), masyarakat menuntut mundur Bupati Banyuwangi (Kapos, 06/05/06), demo Buruh menuntut perbaikan upah (1990,1993), demo buruh May Day (1 Mei 2006), Desa Kenyala di Kobar (Mei 2005), Desa Runtu di Kobar (2006), Desa Terawan di Seruyan (April 2005) masyarakat PT Adaro (Bartim, Mei 2005), Peristiwa Trisakti (12/05/1998), Semanggi I&II (1998,1999), dan lain-lain. Sedangkan konflik horizontal adalah konflik antar etnis dan antar golongan/agama. Beberapa contoh kasus konflik sosial/ kekerasan yang bersifat horizontal adalah: Ambon (1999), Poso (2000-2006), Sanggauledo (1997), Sambas-Kalimanta Barat (1999), Kodya Pontianak (2000). Kupang/ NTT (1998 & 2000), Mataram/ NTB dikenal dengan peristiwa 171 (2000), Sampit-Kalteng (2001), Pribumi-Non Pribumi di Jakarta (1998). Dari berbagai kasus tersebut, Ambon, Poso, Mataram, dan Kupang dapat digolongkan ke dalam konflik antar agama, dan sisanya adalah konflik sosial antar etnis dan antar golongan.

Menurut Suparlan (1999) bahwa konflik sosial adalah merupakan perluasan dari konflik individual, yang umumnya terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antardua kelompok atau lebih yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang (lihat Kasus Ambon, Poso, dan yang terakhir ini adalah Mimika-Papua). Konflik sosial terjadi antar dua kelompok atau lebih, yang terwujud dalam bentuk konflik fisik antar mereka yang tergolong sebagai anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang berlawanan. Dalam konflik sosial, terdiri dari orang perorang yang terlihat dalam konflik tersebut tidak lagi diakui keberadaannya. Jati diri orang perorang tersebut diganti oleh jati diri golongan atau kelompok. Dengan kata lain, dalam konflik sosial yang terjadi bukanlah konflik antar individu/orang perorang dengan jati diri masing-masing melainkan antar orang perorang yang mewakili jati diri golongan atau kelompoknya (etnis atau agama).

Dalam konflik sosial, yang disebabkan oleh rasa ketidakadilan kesewenang-wenangan ataupun kekalahan, dipahami sebagai penghancuran harga diri dan kehormatan (lihat kasus konflik sosial antar etnis di Sampit-Kalteng 2001). Penghancuran harga diri itu kemudian dipahami sebagai kehancuran eksistensi atau keberadaan suku bangsanya. Suku bangsa adalah acuan yang primordial (yang utama dan pertama) dalam dan bagi kehidupan seseorang. Suku bangsa bagi warga suku bangsa yang bersangkutan adalah sama dengan dirinya sendiri. Oleh karenanya, bila ada penghinaan/ tekanan/ dominasi / ketidakadilan terhadap dirinya adalah sama dengan penghinaan terhadap suku bangsanya dan demikian sebaliknya. Dalam era Otonomi Daerah, Demokrasi dan arus globalisasi dewasa ini, persaingan baik secara individu maupun secara kelompok semakin ketat dalam berbagai aspek kehidupan. Bila persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya atau sumber rezeki tidak berjalan secara adil

umumnya akan memicu konflik sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini masuk jenis penelitian deskriptif kualitatif yakni melakukan studi kasus (*case study research*) yang akan menggunakan *ethnographic approach* mengingat penelitian ini bertujuan menggali data secara mendalam (*in depth*) dengan cara menghimpun pendapat informan yang akan diteliti (*emic perspective*), mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian, mencari informasi faktual, mengidentifikasi masalah-masalah atau untuk mendapatkan justifikasi keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung dalam masyarakat dan menggali secara objektif pendapat atau aspirasi masyarakat (*insider's viewpoint*) tanpa intervensi opini dari orang luar (*etic viewpoint*). Penelitian ini dilaksanakan di Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dimana di kota tersebut pernah terjadi konflik sosial antar etnis (Dayak dan Madura) pada tahun 2001. Untuk mengumpulkan data primer di lapangan yaitu menggunakan teknik observasi dan wawancara mendalam, dan data sekunder diupayakan dengan cara menelaah sumber tertulis yang relevan. Informan kunci ditentukan dengan *purposive sampling* dan selanjutnya untuk penelusuran informan selanjutnya dengan teknik *snow ball*. Dalam penelitian kualitatif, jumlah informan tidak akan menentukan hasil penelitian. Oleh karenanya seberapa jumlah informan yang diperlukan dalam penelitian sangat ditentukan oleh peneliti. Apabila informasi yang diperoleh dirasa sudah mencukupi/ memadai untuk memahami sesuatu masalah atau feneomena yang sedang dikaji, maka seorang peneliti bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri wawancaranya dan mengabaikan calon informan lainnya. Dalam penelitian ini kami hanya mengambil 12 orang informan untuk diwawancara.

Selanjutnya Data yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu mengalami proses reduksi data, baru kemudian dianalisis dengan teknik *interpretive analysis* (Geertz, 1873). Terakhir, data yang diperoleh dari lapangan perlu diperiksa keabsahan datanya dengan teknik triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Penyajian Data

Pada saat monitoring internal dilakukan, kami sudah melaporkan bahwa kegiatan penelitian di lapangan dalam rangka pengumpulan data sudah kami laksanakan di Kota Sampit pada tanggal 30 Juli-05 Agustus 2016. Teknik Pengumpulan Data yaitu dengan (a) pengamatan berperan serta, (b) wawancara mendalam, dan (c) dokumentasi. Penulisan hasil dan pembahasan ini kami sajikan secara berjenjang atau berurutan agar mudah dibaca dan gampang difahami oleh pembaca, yaitu mulai dari memahami berbagai faktor penyebab konflik, Dampak dari konflik itu sendiri, dan terakhir akan dibahas bagaimana pengelolaan kehidupan bermasyarakat berbasis *Huma Betang* untuk menjamin bahwa keharmonisan, kedamaian, kesatuan, dan persatuan tetap kokoh di Bumi *Tambun Bungai* Kalimantan Tengah.

### 1. Latar Belakang Konflik antar Etnis di Sampit Tahun 2001

Berdasarkan latar belakang terjadinya konflik di Sampit Kalimantan Tengah tahun 2001, tidak terlepas dari kasus konflik antar etnis di Sanggau Ledo, Kalimantan Barat tahun 2009. Konflik antar etnis di Sanggau Ledo tersebut tidak terlepas karena ulah para provokator. Konflik itu diawali pada saat ada pertunjukan orkes Melayu di Sanggau Ledo, dua pemuda saling bersenggolan secara tak sengaja lalu berlanjut menjadi sebuah perkelahian sengit hingga berakibat kematian

salah seorang pemuda Dayak oleh pemuda Madura. Akibatnya memicu semacam perang terbuka antara orang Madura dengan orang Dayak di Sanggau Ledo dan beberapa tempat di Provinsi Kalimantan Barat. Konflik tersebut seolah meninggalkan kesan bahwa etnis Madura kalah 'perang' melawan orang Dayak dan Melayu. Sehingga semua etnis Madura yang bertempat tinggal di wilayah provinsi Kalimantan Barat semua ditampung di sebuah penampungan khusus di Kota Pontianak dengan dijaga secara ketat oleh aparat keamanan yaitu tim gabungan Polri dan TNI. Tampaknya provokatorpun tidak tinggal diam, mereka bergerak ke Kalimantan Tengah, karena di Provinsi Kalimantan Tengah jumlah populasi penduduk orang Madura nomor dua setelah Kalimantan Barat. Konsentrasi populasi etnis Madura di Kalimantan Tengah terdapat di tiga Kabupaten /Kota: Kota Palangka Raya, Kotawaringin Timur, dan kabuapten Kotawaringin Barat.

Provokator menyusun strategi melakukan pembalasan atas konflik di Sanggau Ledo, dengan menyulut konflik di kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah. Secara historis tercatat lebih dari 20 kasus konflik-konflik kecil antara Dayak dan Madura di Kalimantan Tengah sejak kedatangan mereka ke Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1960-an.

Pecahnya konflik sosial bernuansa etnis antar orang Dayak dan orang Madura di Kalimantan Tengah, dimulai pada saat empat orang bermain judi di sebuah tempat penambangan emas tradisional di Kereng Pangi: 3 orang Madura dan satu orang Dayak. Pada saat judi tersebut terjadi perkelahian yang tidak seimbang sehingga orang Dayak itu mati terbunuh oleh tiga orang Madura tersebut. Setelah terjadinya perkelahian yang berakibat matinya pemuda Dayak, kondisi sosial dalam masyarakat mulai goyah, khususnya di Kota Palangka Raya dan Kota Sampit. Hampir satu bulan berbagai isu yang mengarah pada

konflik, akhirnya pecah di Jalan Padat Karya Sampit pada tanggal 18 Februari 2001. Berdasarkan data, selama tiga hari orang-orang Madura telah menguasai Kota Sampit, sementara orang Dayak mengungsi ke luar Kota Sampit untuk menjaga keamanan. Orang-orang Madura seolah berpesta pora atas kemenangan mereka menguasai kota Sampit. Di corong mesjidpun di kumandangkan bahwa konflik tersebut adalah konflik agama dan kota Sampit akan dijadikan Sampang ke-2. Kota Sampit adalah Sampang ke-2 juga ditulis di beberapa spanduk yang dibentangkan di jalan-jalan utama di kota Sampit.

Namun tidak pernah diiduga oleh orang-orang Madura bahwa pada hari keempat konflik itu suasana mulai berubah, dimana orang-orang Dayak dari berbagai pelosok Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan bahkan dari Kalimantan Timur dan Serawak mulai memasuki kota Sampit lengkap dengan senjata tombak dan mandau. Suasana mulai kacau, karena tampaknya berbagai kekuatan gaib atau magispun mulai tampak, karena beberapa orang Madura yang dianggap memiliki ilmu hitam tahan tembak/pisau, ternyata mati juga di timpas dengan menggunakan mandau dan ditombak. Dari situ orang Madura mulai ketakutan dan akhirnya memilih mundur dan mengungsi keluar kota, yaitu ke Banjarmasin, dan ke Surabaya, dan sebagian lagi langsung dungsikan di Sampang, Madura. Konflik sosial antar etnis Dayak-Madura ini tidak pernah diselesaikan secara hukum, karena masalahnya terlalu rumit dan sensitif. Akhirnya penyelesaian konflik tersebut didominasi penyelesaiannya secara sosial dan budaya, seperti proses rekonsiliasi, melalui diskusi, penyuluhan, dan seminar untuk memberikan pemahaman adat-istiadat dan kebudayaan dari kedua belah pihak. Konsep penyelesaian akhir yang digagas oleh pemerintah bersama tokoh adat Dayak Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut: Orang-orang Madura yang berada di



penampungan/pengungsian di Surabaya dan di Sampang disuruh memilih tiga alternatif:

- (1) Menetap di Surabaya dan/atau di Sampang dan mendapat pembinaan dari pemerintah
- (2) Memilih tempat baru (bertransmigrasi ke tempat baru) Sulawesi atau Sumatera, bukan ke wilayah Kalimantan.
- (3) Sebagian boleh kembali ke Kalimantan Tengah secara selektif dan dengan syarat:
  - a. Sudah memiliki hubungan keluarga,
  - b. Sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS, TNI, POLRI, DPR, penguaha Orang orang yang tidak memiliki pekerjaan yang jelas, penganggur, preman, dan llain-lain di larang kembali ke Kalimantan Tengah,
  - c. Cara kembali secara bertahap dan tidak boleh dalam jumlah besar  
(Sumber Data dari bapak Derwin Marang, mantan Damang Mentawa baru)

## 2. Faktor Penyebab Konflik

Dari 12 (dua belas) orang informan yang kami wawancara di lapangan, khususnya di kota Sampit, dapat di simpulkan bahwa faktor penyebabnya sangat variatif, yaitu bersumber dari 4 (empat) faktor:

### 2.1. Faktor Sosial

Dijelaskan oleh beberapa infoman kami bahwa ternyata ada juga beberapa orang Madura yang menjadi preman di pasar, pelabuhan, dan di terminal bus/angkutan kota. Ada juga yang menjadi pencuri, penjambret, pemerkosa, dan juga pemabuk. Ada lagi yang berprofesi sebagai preman tanah, yaitu menyerobot tanah-tanah orang lain kendatipun tanah itu sudah ada sertifikat tanahnya (SHM). Namun kalau tanah itu diklaim oleh orang yang benar-benar pemiliknya, lalu diajak berkelahi.

Menurut pendapat Yuda (informan), orang Madura tidak berani berkelahi secara individu, dia pasti akan datang membawa teman-temannya (secara berkelompok).

Misalnya, pada awalnya terjadi cek-cek secara individu dengan orang lain, tetapi kemudiiian ia akan segera datang dengan membawa puluhan temannya sambil membawa celurit. Salah satu hal penting juga menurut Endra (Satpam Pasar Induk), orang-orang Madura yang terjerat kasus pidana seperti pemerkosaan, perkelahian, pencurian dan pembunuhan banyak yang tidak dproses karena ada salah seorang polisi Madura di Polres Kotawaringin Timur yang selalu berusaha menyembunyikannya atau segera mengirim mereka yang bermasalah itu pulang ke Sampang atau ke Madura. Lain lagi cerita ibu Enon (informan) bahwa dulu saat orang Madura masih **mwnguasai** ekonomi seagai pedagang di pasar. Misalnya melakukan tawar menawar dengan pedagang orang Madura atau tidak jadi membeli dagangannya karena dianggap mahal, maka kita pasti dicaci maki olehnya, atau dipaksa harus membeli barang dagangannya. Demikian kalau kita naik beca, padahal kita sudah melakukan tawar menawar sebelum naik beca. Tetapi sesampainya kita ditujuan yang telah disepakati, tiba-tiba dia minta tambah biaya, alasanya terlalu jauh dan perkiraan dia salah. Awalnya dia kira dekat dan setuju biayanya, tetapi setelah sampai ia pura-pura tidak tahu dan meminta tambahan biaya. Kalau kita tidak memenuhi permintaannya ia lalu marah atau mengancam kita.

### 2.2. Budaya

Ada dua kebudayaan yang berbeda. Orang Madura yang berasal dari Sampang, daerah yang tandus, miskin dan desa Nelayan tentu **memiliki** jiwa yang keras dan menantang. Sementara orang Dayak yang tinggal di tengah hutan belantara memiliki jiwa harmoni dengan alam dan pasrah pada alam, akhirnya muncul sifat rukun dengan alam atau sifat mengalah bila berhadapan dengan orang lain. Orang Dayak tidak pernah agresif atau mendahului dalam hal kekerasan,

sejauh masih ada waktu/ruang dan kesabaran tetap mengalah dan menghindari terjadinya konflik atau perselisihan. Sifat mengalah orang Dayak inilah yang dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh orang Madura untuk menguasai orang Dayak. Sifat mengalah itu dianggap bahwa orang Dayak Penakut. Pendapat ini kami sarikan atau sederhanakan dari pendapat Dewin Marang Mantan Damang Mentawa Baru. Padahal kata Dewin Marang, budaya mengalah ini berasal dari ajaran agama Kaharingan orang Dayak. Orang Madura yang datang ke Kalimantan ini, kata Dewin Marang, tidak pernah mau menghormati kebudayaan Dayak, mereka justru ingin mengubah kebudayaan Dayak menjadi kebudayaan Madura. Seharusnya memiliki falsafah dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Kalau membawa beca pasti menggunakan pakaian kaos loreng, celana gabor warna hitam, dan pake penutup kepala sejenis lawung orang Dayak. Kemudian di bawah becanya pasti ada celurit yang setiap saat bisa dicabut kala ada ancaman. Tempat tinggal mereka selalu mengelompok dan kumuh. Di setiap kota dimana mereka berada pasti ada organisasi sosial yang bernama Ikatan Keluarga Madura (IKAMA). Orang Madura sudah sejak tahun 1960-an sudah ada di Kalimantan Tengah. Maka tidak heran kalau ada beberapa orang Madura sudah menikah dengan orang Dayak dan sebagian kecil bisa berbahasa Dayak.

### 2.3. Faktor Ekonomi

Sebagai faktor ekonomi, kedua 12 informan mengatakan bahwa orang Madura memang telah menguasai sektor ekonomi di Kota Sampit dan Kotawaringin Timur pada umumnya. Hal ini didukung oleh adanya beberapa orang Madura tinggal di Kota Sampit yang menjadi pengusaha besar dan kaya raya dan sebagian lagi memegang jabatan penting dalam masyarakat dan pemerintahan. Sebagian besar pedagang

besar dan kecil dikuasai oleh orang Madura, hotel/losmen, pangkalan ojek, buruh pelabuhan, preman pasar dan preman di pelabuhan, sopir taksi, warung-warung sate, pedagang keliling, abang beca, pengusaha angkutan air, angkutan kota, angkutan bus, dan travel. Di samping itu beberapa orang Madura justru menjadi tuan tanah, mereka menjual kaplingan tanah kepada penduduk lokal. Orang-orang **loakl** seperti Dayak, Melayu dan Banjar tidak bisa bersaing dengan orang-orang Madura dalam sektor ekonomi karena pada umumnya orang Madura suka bekerja keras, bekerja secara kelompok, dan bersaing secara kasar dengan orang lain di luar kelompok mereka. Misalnya ada orang Dayak **aaau** orang Banjar masuk ke wilayah ojek orang Madura, tidak segan-segan mereka usir dan ancam

### 2.4. Faktor Politik

Dari hasil wawancara dengan 12 orang informan di Kota Sampit dapat kami simpulkan bahwa faktor politik juga sebagai salah satu faktor pemicu konflik di Kota Sampit. Faktor politik dapat dilihat dari aspek agama dan etnis yang sering dikenal dengan politik identitas. Semua orang Madura menganut agama Islam, sehingga mereka membangun mesjid dan pesantren di Kota Sampit. Demikian pula jumlah populasi orang Madura yang datang ke Sampit, Kotawaringin Timur setiap tahunnya semakin besar jumlahnya. Orang-orang Madura yang miskin dari Sampit didatangkan secara khususnya oleh beberapa pengusaha Madura yang kaya raya di Sampit. Secara politis, orang Madura telah tersebar di berbagai lini pemerintahan dan swasta di Kota Sampit dan beberapa kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Seperti guru, PNS, polisi, tentara, anggota DPRD, pedagang, pengusaha, dan bahkan preman. Pernah satu kali seorang bupati Kabupaten Kotawaringin Timur adalah orang Madura.

Identitas etnis dan identitas agama ini sangat menguntungkan bagi mereka pada saat pilkada dan pilcaleg yang diadakan baik di Kotawaringin Timur maupun di Kalimantan Tengah, sehingga jumlah orang Madura yang menjadi anggota dewan, bupati, walikota, dan bahkan gubernur bisa mereka realisasikan.

### **Dampak Konflik Antar Etnik Tahun 2001 di Sampit**

Para informan yang berjumlah 12 orang, semuanya memberi pendapat yang baik dan positif tentang dampak konflik antar etnik tahun 2001 di Sampit. Mereka lebih banyak melihat dampak positifnya. Mulai dari aspek ekonomi, orang Dayak sudah bisa berusaha setara dengan penduduk pendatang. Mereka tidak pernah mendapat tekanan atau persaingan yang menakutkan dengan orang lain, seperti berdagang di pasar, jadi tukang ojek, sopir angkut, satpam, tukang parkir dan lain-lain. Walaupun sudah banyak orang Madura datang di kota Sampit sebagai pedagang, tetapi mereka tidak seperti dulu lagi. Mereka berdagang dan bersaing secara baik dan sopan. Toleransi sudah baik, orang Madura sangat menghargai agama dan suku lain. Orang Madurapun sudah bisa bergaul dengan suku dan agama apa saja, artinya mereka sudah terbuka dan tidak tertutup seperti dulu lagi. Orang Madura sudah memiliki jiwa yang ramah, suka bergaul, bersenda gurau, dan bermasyarakat. Merkapun menghormati budaya dan adat-istiadat orang Dayak. Tidak pernah lagi memaksakan kehendak, menipu atau mencuri atau sengaja mengambil barang-barang atau tanaman orang lain di pinggir jalan. Konflik sosial berdarah, tidak selalu meninggalkan dampak negatif, tetapi dampak positifnya pun sering luar biasa. Seperti konflik antar etnis di Sampit khususnya, di Kalimantan Tengah umumnya telah merubah secara total kepribadian orang Madura dan orang Dayak. Kedua belah pihak menyadari kekelaman masa

lalu, untuk bersama-sama melangkah menuju ke kehidupan *Belom Bahadat* (hidup beradab).

### **Pola Pembinaan Interaksi Sosial Yang Diharapkan**

Pada bagian akhir dari kegiatan wawancara ini kami meminta pendapat para informan tentang bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam melakukan pembinaan masyarakat, khususnya di Kota Sampit sebagai upaya pemerintah agar konflik sosial tidak terulang lagi di kemudian hari. Dari hasil wawancara kami dengan ke-12 informan ternyata pendapat mereka sangat bagus dan brilian tentang bagaimana seharusnya pembinaan masyarakat untuk memperkuat kesatuan dan persatuan serta menghindari terjadinya konflik dalam masyarakat.

Pertama: Penegakan hukum secara adil kepada siapa saja yang melanggar hukum. Artinya siapa saja yang bersalah secara hukum, hukum tidak boleh melihat suku, agama dan status sosialnya. Semua sama di depan hukum. Kedua: Semua yang dianggap pendatang harus membawa falsafah *Belom Bahadat*: dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Artinya harus bisa menyesuaikan diri dengan adat dan budaya dimana kita berada. Ketiga: Memahami dan menegakkan toleransi. Memahami dan mempraktekkan makna *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti hidup bersatu dan damai dalam keberagaman. Bisa menerima, menghargai dan menghormati keberagaman. Keempat: Memperkuat dan mengembangkan tugas dan fungsi FKUB. Anggota pengurus FKUB agar bertindak adil, cepat, tepat, dan responsif. Keenam: Tetap mempertahankan dan mensosialisasikan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kependudukan. Apabila Perda ini sudah dapat diketahui secara luas dan dapat ditaati oleh semua pihak, maka setiap warga masyarakat tahu persis tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik.

## ANALISIS DATA

Ada teori sosiologi tentang pola adaptasi dan interaksi sosial yang dikemukakan oleh Sarjono Soekanto(1986) bahwa bentuk-bentuk interaksi sosial dapat berupa:

- (a) Kerjasama(*Cooperation*)
- (b) Persaingan(*Competition*)
- (c) pertentangan(*Conflict*)

Hal seperti ini lumrah terjadi karena pada umumnya setiap adanya pertemuan antar individu atau kelompok yang berbeda dan belum saling mengenal pasti melalui tiga proses ini, yaitu (1) Kerjasama, kemudian muncul kompetisi, dan karena semakin tajamnya persaingan/kompetisi, maka akan menimbulkan pertentangan(*conflict*). Ditambahkan, bahwa biasanya apabila suatu konflik bisa diredakan munculah bentuk interaksi sosial yang keempat ialah Akomodasi, yaitu suatu bentuk penyesuaian diri walaupun hanya sebentar karena kedua belah pihak kurang bisa menerima hasil keputusan untuk menghentikan konflik. Lebih lanjut Gilin and Gilin(1954) menyatakan bahwa dalam proses interaksi sosial pasti akan terjadi dua macam pola interaksi sosial berikut:

- a. Proses Asosiatif, terdiri atas: akomodasi dan Asimilasi
- b. Proses Dissosiatif, terdiri atas persaingan dan pertentangan/konflik

Bila dilihat dan dipahami dari hasil wawancara dengan 12 orang informan, semua suku bangsa yang ada di Kota Sampit, khususnya orang Madura dan orang Dayak sudah masuk dalam proses interaksi sosial yang asosiatif, dimana orang Madura sudah menyadari benar akan beberapa kelemahan mereka di masa lalu, sehingga mereka masuk pada proses akomodasi, yaitu proses penyesuaian diri dengan lingkungan dimana mereka berada. Demikian juga proses asimilasi, yaitu proses pembauran diri dengan suku dan agama lain tanpa memiliki prasangka. Hanya

mungkin satu hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu kebiasaan orang Madura hidup secara kelompok, agar mereka bisa tinggal secara terpencar bersama etnis dan agama lain yang berbeda. Belajar hidup bersama dengan orang lain yang berbeda suku dan agama itu sangat penting pada saat ini. Inilah konsep Falsafah Betang: Hidup Dalam Keberagaman yang harus kita fahami dewasa ini dan kita praktekan dalam kehidupan kita setiap hari baik dalam lingkungan rumah tangga, lingkungan masyarakat, lingkungan kerja, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Konflik sosial antar etnik dapat dikatakan sebagai suatu wujud pertentangan alamiah yang disebabkan oleh pertentangan antar individu atau antara kelompok yang berbeda etnik karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai, norma atau kebutuhan hidup (Liliweri 2005:146). Faktor penyebab terjadinya konflik antar etnik di kota Sampit Kalimantan Tengah pada tahun 2001 adalah faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural terdiri atas ekonomi, politik dan agama, dan faktor kultural terdiri atas: Budaya kekerasan. Sebagai saran yang disampaikan sebagai berikut:

Pertama: Penegakan hukum secara adil kepada siapa saja yang melanggar hukum. Artinya siapa saja yang bersalah secara hukum, hukum tidak boleh melihat suku, agama dan status sosialnya. Semua sama di depan hukum.

Kedua: Semua yang dianggap pendatang harus membawa falsafah *Belom Bahadat*: dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung. Artinya harus bisa menyesuaikan diri dengan adat dan budaya dimana kita berada.

Ketiga: Memahami dan menegakkan toleransi. Memahami dan mempraktekan makna Bhinneka Tunggal Ika yang berarti hidup bersatu dan damai dalam keberagaman. Bisa menerima, menghargai dan menghormati

keberagaman.

Keempat: Memperkuat dan mengembangkan tugas dan fungsi FKUB. Anggota pengurus FKUB agar bertindak adil, cepat, tepat, dan responsif.

Kelima: Tetap mempertahankan dan mensosialisasikan Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Kependudukan. Apabila Perda ini sudah dapat diketahui secara luas dan dapat ditaati oleh semua pihak, maka setiap warga masyarakat tahu persis tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Castells, Manuel. 1997. *The Power of Identity*. London: Blackwell.
- Eriksen, Thomas Hylland. 1993. *Ethnicity And Nationalism: Anthropological Perspectives*. London: Pluto Press.
- Geertz, Clifford. 1992. *Tafsir Kebudayaan (Interpretation of Cultures)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gillham, Bill. 2000. *Case Study Research Methods*. London: Continuum
- Horowitz, Donald L. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley: University of California Press.
- Isaacs, Harold R. 1993. *Pemujaan Terhadap Kelompok Etnis*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Koentjaraningrat. 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, J. Lexy 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Riwut, Tjilik. 2003. *Maneser Panatau Tatu Hiang/Menyelami Kekakayan Leluhur*. Palangka Raya: PUSAKAlima
- Ross, Marc Howard. 1993. *The Management of Conflict*. New Haven: Yale University Press.
- Sakai, Minako. 2002. *Beyond Jakarta: Regional Autonomy and Local Society in Indonesia*. Adelaide: Crawford House Publishing.
- Soekanto, Sarjono. 1986. *SOSIOLOGI: Suatu Pengantar*. Jakarta: CV. Rajawali
- Suparlan, Parsudi. 1999. *Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya*. Dalam ANTROPOLOGI INDONESIA, Indonesian Journal of Social and Cultural Anthropology. Nomor 59 Tahun XXIII, Mei- Agustus 1999, hal: 7-19
- Surata, dkk. 2001. *Atasi Konflik Etnis*. Yogyakarta: Global Pusaka Utama.
- Sztompka, Piotr. 2011. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Widen, Kumpiady. 2001. *The Impact of Globalization on Dayak Identity*. Unpublished Ph.D, Dissertation at La Trobe University, Melbourne-Australia.